



## Kuasa dan Ideologi Kepolisian Republik Indonesia terhadap Anarko- Sindikalis: Analisis Wacana Kritis

Adif Setiyoko  
B.R. Suryo Baskoro\*

Linguistics Master Program,  
Universitas Gadjah Mada

[suryobaskoro@ugm.ac.id](mailto:suryobaskoro@ugm.ac.id)

### ABSTRAK

Ideologi dan kuasa dipandang sebagai dua konsep sentral dalam kajian-kajian Analisis Wacana Kritis. Keduanya memiliki kaitan erat dengan upaya melanggengkan, mempertahankan, serta menetapkan dominasi pihak-pihak yang berkuasa melalui praktik produksi wacana. Penelitian ini berupaya menyingkap struktur kuasa serta mengidentifikasi ideologi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terefleksikan melalui penggunaan bahasa dalam mengonstruksi representasi kelompok anarko-sindikalis. Untuk menguraikan struktur kuasa dan ideologi Polri, penelitian ini mengadopsi analisis praktik sosiokultural yang menjadi salah satu bagian dari tiga dimensi AWK yang dirumuskan oleh Norman Fairclough. Melalui analisis praktik sosiokultural ini pula, hubungan antara kuasa, ideologi, dan bahasa, mampu teridentifikasi. Hasil kajian ini menemukan bahwa seluruh wacana siaran pers hanya berisi informasi yang berasal dari pihak kepolisian. Dengan kata lain, tak ada satu pun informasi dari pihak terkait, dalam hal ini kelompok anarko-sindikalis. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kuasa sepihak pihak kepolisian dalam merepresentasikan kelompok tersebut. Kuasa yang dimiliki pihak kepolisian ini turut digunakan untuk menciptakan atau menetapkan stigma-stigma tertentu yang dilekatkan kepada kelompok anarko-sindikalis seperti perusuh, kelompok yang menunggangi demonstrasi, merusak fasilitas, dan mengeroyok petugas kepolisian.

**Kata kunci:** ideologi; kuasa; representasi

### PENDAHULUAN

Kehadiran kelompok anarko-sindikalis mulai mendapat perhatian serius dari negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum. Gerak-gerak kelompok yang menganut ideologi anarkisme ini ditanggapi secara resmi oleh Kapolri saat itu, Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dalam konferensi pers di Mabes Polri pasca-peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2019.

Tito menjelaskan bahwa kelompok anarko-sindikalis diduga sebagai dalang di balik sejumlah kerusuhan Aksi May Day 2019 yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Sejak konferensi pers tersebut, sejumlah media massa menerbitkan pemberitaan-pemberitaan yang turut menegaskan cap perusuh yang diberikan oleh Jenderal yang kini menduduki jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.

Tak hanya itu, kepolisian kemudian berupaya memetakan anggota kelompok ini selayaknya jaringan terorisme. Sejak saat itu, kelompok anarko-sindikalis mendapatkan stigma sebagai ancaman keamanan negara. Hal ini ditandai dengan momen pertama kali ketika Polri merilis siaran pers berjudul "*Anarco-Syndicalism Rancang Skenario Penjarahan Besar-besaran*". Itu adalah siaran pers pertama terkait dengan kelompok anarko-sindikalis yang dirilis pada 12 April 2020 melalui laman resmi mereka, [polri.go.id](http://polri.go.id).

Dalam siaran pers tersebut, Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Nana Sujana, menerangkan bahwa kelompok anarko-sindikalis berencana menciptakan keonaran, penjarahan, dan meresahkan masyarakat. Keterangan itu disampaikan setelah kepolisian menangkap lima orang pemuda yang melakukan aksi corat-coret dinding yang bernada provokatif. Melalui aksi tersebut, kelompok anarko-sindikalis dituding akan mengorganisir keonaran dan penjarahan

besar-besaran di Pulau Jawa pada 18 April 2020 memanfaatkan situasi krisis efek dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya, berbagai wacana yang diproduksi Polri lewat siaran pers atau konferensi pers pun semakin menggiring publik untuk bersikap antipati terhadap kehadiran kelompok ini, termasuk ideologi anarkisme secara umum. Hal ini menunjukkan upaya pihak kepolisian dalam menempelkan stigma-stigma tertentu terhadap kelompok anarko-sindikalis melalui penggunaan bahasa yang digunakan, utamanya dalam wacana siaran pers yang diproduksi.

Pada titik ini, ketimpangan kuasa antara kepolisian dengan kelompok anarko-sindikalis semakin terlihat. Sebab, sebagai institusi negara yang mendapatkan mandat untuk menegakkan hukum, kepolisian memiliki sejumlah sumber daya untuk menciptakan ketertiban di Indonesia. Akan tetapi, kuasa sebesar ini tak luput dari potensi timbulnya penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.

Penelitian ini berupaya menyingkap praktik penggunaan bahasa Polri, sebagai pihak yang memiliki kuasa, dalam merepresentasikan kelompok anarko-sindikalis. Sebab, produksi wacana yang dilakukan oleh Polri sangat erat kaitannya dengan hubungan antara bahasa dengan kuasa. Hal ini berangkat dari sebuah paradigma bahwa penggunaan bahasa tak bisa disterilkan dari relasi kuasa di antara penggunanya.

Dengan landasan rasional yang telah disebutkan di atas, pendekatan Analisis Wacana Kritis (selanjutnya disingkat AWK) menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut Van Dijk (2001), AWK meletakkan fokus untuk mengungkap cara-cara struktur wacana dalam menetapkan, mengonfirmasi, melegitimasi, dan memproduksi relasi kuasa dan dominasi dalam sebuah masyarakat.

AWK meyakini, dibutuhkan kajian kritis terhadap bahasa untuk mengadvokasi kelompok-kelompok yang tak memiliki kuasa serta pihak-pihak yang terpinggirkan akibat hegemoni kelompok yang berkuasa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Van Dijk (1997) bahwa AWK berurusan dengan dimensi-dimensi wacana terkait penyalahgunaan kuasa serta ketidakadilan dan kesetaraan yang diakibatkan olehnya.

Pada titik inilah yang mengimplikasikan kehadiran terminologi kritis dalam AWK. Dalam hal ini, kekritisannya dalam kajian AWK melibatkan elemen normatif dalam setiap analisisnya. Dengan kata lain, elemen kritis ini mengarahkan peneliti untuk mengungkap persoalan-persoalan yang muncul dalam sebuah masyarakat, institusi, maupun organisasi dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan itu melalui sebuah landasan normatif (Fairclough 2010b).

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi ideologi Polri terhadap kelompok anarko-sindikalis. Sebab, ideologi menjadi salah satu konsep kunci dalam AWK selain wacana dan kuasa. Dalam AWK, ideologi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tersembunyi dan tersamarkan yang direfleksikan, dikonstruksi, serta diperkuat melalui wacana. Namun demikian, terminologi ideologi dalam perspektif AWK berbeda dengan pengertian ideologi secara umum.

Menurut Fairclough, ideologi didefinisikan sebagai penunjukan atau konstruksi realitas (dunia fisik, relasi sosial, identitas sosial) yang dibangun ke dalam dimensi-dimensi makna maupun bentuk dalam sebuah praktik diskursif, yang mana berkontribusi terhadap produksi, reproduksi, atau perubahan hubungan dominasi (Fairclough 1992).

Konsep ideologi dalam AWK juga dimaknai sebagai keyakinan keseharian yang lebih tersembunyi dan laten, sering kali tersamarkan dalam metafora dan analogi konseptual (Wodak dan Meyer 2009). Ideologi juga memiliki keterkaitan dengan kuasa. Hal ini karena ideologi kelompok yang berkuasa cenderung lebih dominan dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengadopsi kerangka berpikir AWK. Pertama, penelitian yang dilakukan Alameda-Hernández (2014) berupaya mengungkap representasi identitas masyarakat Gibraltar. Konteks yang melatarbelakangi kajian ini yaitu periode referendum atau

penentuan nasib sendiri yang berlangsung di Gibraltar pada tahun 2002. Penelitian ini menelaah proses konstruksi wacana yang digambarkan lewat analisis linguistik terhadap teks berita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Gibraltar pada umumnya direpresentasikan sebagai pihak yang pasif. Hal ini karena nasib mereka dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pihak lain. Selain itu, secara diskursif, masyarakat Gibraltar direpresentasikan sebagai pihak yang sama sekali tak memiliki kuasa untuk menentukan masa depan mereka.

Selain itu, Sriwimon dan Zili (2017) turut membuktikan bahwa kerangka konseptual dalam pendekatan AWK sangat relevan digunakan untuk mendedah stereotip yang melekat pada gender-gender tertentu dalam wacana politik di media massa. Penelitian ini ditempuh guna mengungkap bagaimana bias gender terwujud dalam penggunaan bahasa media massa dalam merepresentasikan Yingluck Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand. Guna mengidentifikasi stereotip yang tercermin melalui penggunaan bahasa di media massa, kajian ini mengadopsi *Systemic Functional Linguistics* sebagai pisau bedah analisis tekstual.

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menempuh tiga langkah metodologis, yakni mencari data dari sumber; melakukan analisis data; lalu menyajikan hasil analisis. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kata, frasa, maupun klausa dalam siaran pers yang diproduksi Polri berkaitan dengan anarko-sindikalis. Sumber data dalam penelitian ini ialah lama resmi *Polri.go.id*.

Setelah data dikumpulkan, kerangka analisis tiga dimensi yang digagas oleh Fairclough (2010a) akan digunakan untuk menganalisis data. Wacana, sebagai sebuah praktik diskursif, harus dilihat melalui tiga dimensi. Pertama, bahasa, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, adalah teks. Kedua yakni praktik wacana dan dimensi terakhir ialah praktik sosiokultural. Namun demikian, karena penelitian ini merupakan bagian dari proyek kajian yang lebih luas yang dilakukan peneliti, aspek yang akan diuraikan hanyalah praktik sosiokultural.

Praktik sosiokultural yang hendak didedah dalam kajian ini berkaitan dengan kuasa dan ideologi kepolisian dalam mengonstruksi wacana terkait kelompok anarko-sindikalis. Sebab, kuasa dan ideologi menjadi dua konsep krusial dalam membongkar praktik-praktik produksi wacana yang berpotensi melanggengkan ketaksetaraan, ketimpangan sosial, maupun dominasi dalam masyarakat. Selain itu, praktik sosiokultural terletak pada tataran makro yang bersifat abstrak.

## PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi, mengungkap, dan menjelaskan praktik sosiokultural yang menjadi latar belakang siaran pers Polri berkaitan dengan kelompok anarko-sindikalis pada data. Dalam kerangka penelitian AWK, praktik sosiokultural terletak pada tataran makro yang bersifat abstrak. Tataran ini berkaitan erat dengan dua aspek utama, yakni kuasa dan ideologi.

Adapun tujuan dari AWK sendiri adalah untuk mengungkap struktur kuasa dan mengidentifikasi ideologi yang terefleksikan melalui penggunaan bahasa. Hal ini pula yang ditekankan oleh Fairclough (2010b) bahwa analisis terhadap kuasa membutuhkan ideologi karena ia adalah elemen yang sentral dalam upaya menetapkan dan mempertahankan sebuah relasi kuasa.

### 1. Kuasa Polri atas Kelompok Anarko-Sindikalis

Fokus utama dalam kerja AWK ialah memahami efek dari relasi kuasa dan ketaksetaraan dalam memproduksi kesalahan sosial alias *social wrongs* yang tercermin melalui penggunaan bahasa. Seperti yang diungkapkan oleh Fairclough (1992), hubungan antara kuasa dengan bahasa ini diwujudkan lewat dua hal, yaitu kuasa dalam wacana (*power in discourse*) dan kuasa di belakang wacana (*power behind discourse*).

Sementara jika dilihat dari tujuannya, Fairclough (2010b) membagi kuasa menjadi dua jenis, yaitu kuasa untuk (*power to*), yakni kuasa untuk melakukan atau berbuat sesuatu, dan kuasa atas (*power over*), yakni kuasa atas orang atau kelompok lain. Kedua jenis kuasa ini harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat dialektis. Pertama, orang atau kelompok yang lebih berkuasa atas orang atau kelompok

lain memiliki kuasa untuk berbuat sesuatu. Kedua, kuasa untuk melakukan sesuatu ini bisa didapatkan apabila orang atau kelompok memiliki kuasa atas orang atau kelompok lain.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap wacana atau siaran pers Polri terkait kelompok anarko-sindikalis menunjukkan adanya praktik kuasa di belakang wacana. Hal ini terwujud dari upaya pihak kepolisian dalam menyajikan informasi mengenai kelompok anarko-sindikalis melalui siaran pers tanpa adanya ruang bagi pihak terkait untuk menyodorkan aspirasinya.

Hal ini menandakan adanya kuasa sepihak, yakni kuasa Polri atas kelompok anarko-sindikalis. Sebab, dalam siaran pers yang diproduksi Polri tak satu pun menyertakan pernyataan dari kelompok tersebut. Dengan kata lain, informasi dari pihak kepolisian menjadi wacana tunggal yang tak menghadirkan perspektif tandingan dari kubu lain. Hal ini menegaskan bahwa kepolisian adalah pihak yang berkuasa karena menyajikan informasi secara aktif, sementara kelompok anarko-sindikalis hanya menjadi objek pasif.

Penelitian ini menemukan dua aspek utama yang berkaitan dengan kuasa Polri atas kelompok anarko-sindikalis. Pertama, seluruh siaran pers yang diproduksi Polri berisi informasi yang berasal dari pihak kepolisian. Dengan kata lain, tak ada satu pun informasi dari pihak terkait, dalam hal ini kelompok anarko-sindikalis. Sementara aspek kedua yakni berkaitan dengan substansi informasi yang dimunculkan dalam siaran pers Polri. Dalam aspek ini, substansi informasi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa bernada negatif yang dilakukan oleh kelompok anarko-sindikalis.

## Aktor Sosial yang Dominan

### a. Pihak kepolisian

Dalam data (1) dan (2) di bawah ini, menunjukkan adanya praktik kuasa sepihak yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menghadirkan aktor-aktor sosial yang terlibat. Temuan dari penelitian ini juga menggambarkan bahwa pihak kepolisian seolah-olah menjadi pihak yang paling berwenang dalam mengonstruksi realitas yang terjadi terkait peristiwa penangkapan massa aksi pada unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

- (1) *“Jadi kami sampaikan bahwa beberapa orang yang diamankan terindikasi itu pertama ada kelompok anarko itu sebanyak 796, ini ada di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (9/10/2020).*

(SP-1-05)

- (2) *Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 500 orang, termasuk dari kelompok Anarko ditangkap pihak kepolisian. Mereka terlibat keributan dalam aksi demo menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.*

(SP-2-01)

Data (1) dan (2) menghadirkan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, serta Polda Metro Jaya, sebagai pihak yang memberikan pernyataan secara resmi terkait penangkapan massa aksi yang mengikuti unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada bulan Oktober tahun 2020.

Dalam siaran pers yang dirilis melalui laman *Polri.go.id*, nyaris tak ditemukan informasi-informasi yang berasal dari pihak terkait, yakni kelompok anarko-sindikalis. Seluruh pernyataan dan informasi yang dihadirkan dalam teks siaran pers berasal dari pihak kepolisian. Hal ini yang membedakan siaran pers sebagai sebuah pernyataan resmi dari institusi dengan teks berita yang diproduksi oleh media massa.

Jika kerja jurnalistik memungkinkan proses klarifikasi, verifikasi, maupun investigasi yang mengakomodasi bantahan-bantahan terkait informasi tertentu, hal ini tidak berlaku bagi siaran pers yang dibuat oleh pihak kepolisian. Sebab, pihak kepolisian memiliki kontrol penuh terhadap

informasi-informasi yang disajikan terkait dengan peristiwa penangkapan massa aksi dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Kedua data di atas juga memosisikan orang-orang yang terindikasi sebagai kelompok anarko-sindikalis sebagai pihak yang pasif. Kondisi ini menggambarkan relasi kuasa antara pihak kepolisian dengan kelompok anarko-sindikalis. Hal ini turut merepresentasikan adanya kesepihakan (*one sidedness*) pada wacana pihak kepolisian. Menurut Fairclough (1992), kesepihakan ini terjadi karena adanya jarak secara spasial maupun temporal antara penyusun siaran pers ini dengan publik mengonsumsinya (penonton, pendengar, maupun pembaca). Kondisi semacam ini jelas tak memungkinkan adanya interaksi.

#### **b. Kelompok anarko-sindikalis**

Kelompok anarko-sindikalis menjadi aktor sosial yang hanya dihadirkan sebagai pihak yang tak memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau pernyataan tandingan. Dalam data (3) dan (4), identitas pihak ini dalam peristiwa unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja hanya hadir dari pernyataan pihak kepolisian.

(3) *Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya mobil yang digunakan untuk memasok makanan, batu – batuan, hingga bom molotov untuk digunakan **perusuh** demo Omnibus Law.*

(SP-3-01)

(4) *Ia menambahkan, pihaknya memastikan para **pedemo yang bertindak anarkis** tersebut berasal dari **kelompok anarko**.*

(SP-3-05)

Data (3) dan (4) di atas menunjukkan kehadiran kelompok anarko-sindikalis sebagai kelompok massa aksi yang menciptakan keributan dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020. Kedua data tersebut berasal dari teks siaran pers yang sama, yang berjudul "*Polisi: Ada Mobil Pemasok Makanan dan Bom Molotov ke Perusuh*" yang ditayangkan melalui laman resmi Polri.go.id pada 11 Oktober 2020.

Kata *perusuh* dalam data (3) dan frasa *pedemo yang bertindak anarkis* serta *kelompok anarko* dalam data (4) merujuk pada kelompok anarko-sindikalis yang menjadi aktor sosial dalam wacana siaran pers. Hal ini menunjukkan bahwa pedemo atau aksi massa yang menciptakan keributan dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tersebut adalah kelompok anarko-sindikalis

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kuasa yang terjadi antara kelompok anarko-sindikalis dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian merupakan pihak yang berkuasa atas produksi wacana terkait dengan kelompok anarko-sindikalis. Jika merujuk pada pernyataan Van Dijk (2001), mengontrol wacana, atau dominasi, merupakan sebuah wujud kuasa yang utama. Sebab, selain itu, mengontrol pikiran merupakan bentuk upaya dalam mewujudkan dominasi serta hegemoni.

#### **Substansi dan Cakupan Informasi**

Siaran pers yang menjadi teks yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan substansi serta cakupan informasi dalam mengonstruksi wacana. Informasi-informasi yang dicantumkan oleh penyusun teks ini hanya sebatas pada representasi-representasi tertentu yang menyangkut soal kelompok anarko-sindikalis.

Substansi informasi yang dihadirkan pun hanya berkisar pada perilaku-perilaku miring yang dilakukan kelompok anarko-sindikalis dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Bahkan, kelompok anarko-sindikalis cenderung diidentifikasi sebagai kelompok yang tak termasuk dalam massa aksi. Selain itu, identitas mereka hanya ditampilkan secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa wacana yang disusun pihak kepolisian memang hanya bertujuan untuk mengonstruksi citra-citra tertentu yang dilekatkan pada kelompok tersebut. Berikut beberapa data yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

**a. Anarko-sindikalis sebagai perusuh**

Wacana siaran pers pihak kepolisian yang didedah dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kelompok anarko-sindikalis merupakan pihak-pihak perusuh dalam serangkaian aksi penolakan UU Cipta Kerja pada bulan November 2020.

- (5) *Polri menyampaikan telah mengamankan 3.862 pendemo yang diduga menjadi **perusuh** dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dari total tersebut, 700an orang yang merupakan **kelompok Anarko** ditangkap.*

(SP-1-01)

- (6) *“Sudah hampir seribu yang kami amankan, mereka adalah **kelompok anarko, perusuh** semuanya,” lanjutnya.*

(SP-6-05)

Data (5) dan (6) di atas menampilkan konstruksi wacana yang dibentuk pihak kepolisian dalam menghadirkan citra kelompok anarko-sindikalis. Dalam data (5), misalnya, kelompok anarko-sindikalis disandingkan dengan sejumlah massa aksi yang terlibat dalam kericuhan pada peristiwa demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Hal serupa juga terjadi pada data (6). Dalam teks tersebut, frasa *kelompok anarko* diidentifikasi secara anaforis merujuk pada kata *perusuh* yang muncul setelahnya. Hal itu juga memperlihatkan hubungan leksikal antara keduanya yang terbentuk melalui endofora, atau hubungan dan keterkaitan informasi yang terdapat dalam teks yang sama (Brown dan Yule 1983). Hubungan tersebut termasuk dalam kategori anafora, karena pembaca harus mencari informasi rujukan yang muncul sebelumnya. Sebab, kata *perusuh* dalam teks tersebut merujuk pada identitas kelompok anarko-sindikalis yang muncul sebelumnya.

**b. Identitas anarko-sindikalis**

Wacana siaran pers pihak kepolisian turut membentuk identitas tertentu yang menggambarkan kelompok anarko-sindikalis. Penelitian ini menemukan adanya pembatasan substansi serta cakupan informasi yang dilakukan pihak kepolisian dalam merepresentasikan identitas kelompok terkait.

- (7) *Ia menuding bahwa mereka yang diamankan adalah **kelompok anarko**, hingga masyarakat yang hanya memanfaatkan momen demonstrasi. Perlu diketahui, **kelompok anarko** adalah **orang-orang yang menolak keberadaan negara maupun aturan**.*

(SP-5-06)

- (8) *“Ada indikasi **anarko**. Tidak ada mahasiswa dan buruh, **Mereka terdiri dari pengangguran, orang jalan, pengamen**,” ungkapny.*

(SP-5-07)

Sementara dalam data (7) dan (8), konstruksi informasi dalam wacana siaran pers pihak kepolisian menunjukkan identitas kelompok anarko-sindikalis yang hanya ditampilkan secara terbatas. Data (7) menunjukkan identitas yang hendak dilekatkan terhadap kelompok anarko-sindikalis, yakni sebagai *pihak-pihak yang menolak keberadaan negara maupun aturan*. Konstruksi rujukan informasi yang terbentuk dalam kalimat tersebut menunjukkan relasi anaforis. Sebab, dalam data tersebut, informasi terkait penjelasan tersebut merujuk pada frasa kelompok-anarko yang sudah muncul sebelumnya.

Pola serupa juga terjadi pada data (8). Untuk mengetahui, identitas kata mereka dalam data tersebut, pembaca harus mencari informasi yang sebelumnya telah disebutkan, yakni anarko. Dari data (7) dan (8), hal ini menggambarkan konstruksi identitas yang dihadirkan oleh pihak kepolisian terkait kelompok anarko-sindikalis, yakni *sebagai orang-orang yang menolak keberadaan negara maupun aturan*, maupun sebagai *pengangguran, orang jalan, dan pengamen*. Dua identitas tersebut tentu tak mampu menggambarkan konsep, pengertian, maupun ideologi anarkisme secara umum yang dianut oleh kelompok anarko-sindikalis. Dengan demikian, hal ini

menunjukkan upaya pembatasan substansi dan cakupan informasi yang dihadirkan dalam wacana siaran pers Polri.

**c. Anarko-sindikalis di antara massa aksi**

- (9) *“Ini yang merusak perusuh. Ini memang **perusuh yang menunggangi teman-teman buruh** melakukan unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.*

(SP-4-06)

- (10) *“Orang yang mengikuti demo tidak ada yang diamankan, orang ini yang pada saat ingin demo terkena razia yang memang ada indikasi rusuh. **Bukan buruh, bukan mahasiswa mereka ini mau membuat kerusuhan,**” tegasnya. Ia menuding bahwa mereka yang diamankan adalah **kelompok anarko**, hingga masyarakat yang hanya memanfaatkan momen demonstrasi.*

(SP-5-04)

Data (9) dan (10) juga memperlihatkan substansi dan cakupan informasi soal keberadaan kelompok anarko-sindikalis di tengah-tengah massa aksi dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Data (9) menunjukkan informasi yang bersifat anaforis, karena untuk mengetahui rujukan informasi soal ‘perusuh yang menunggangi teman-teman buruh’, pembaca harus mencari informasi yang telah terlebih dahulu muncul, yakni kelompok anarko-sindikalis. Sedangkan dalam data (10) menunjukkan pola kataforis, atau relasi antara dua informasi dan harus mencari informasi yang muncul setelahnya untuk melakukan interpretasi (Brown dan Yule, 1983). Sebab, informasi yang merujuk pada kalimat *bukan buruh, bukan mahasiswa, mereka ini mau membuat kerusuhan* muncul setelahnya, yakni merujuk pada kelompok anarko.

Kedua data di atas juga menunjukkan adanya upaya pemisahan yang dilakukan oleh kepolisian. Karena, kelompok ini dihadirkan sebagai pihak yang berupaya menunggangi massa aksi dalam peristiwa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan kata lain, ada batas pemisah antara massa aksi yang dianggap berasal dari elemen mahasiswa dan buruh dengan kelompok anarko-sindikalis. Hal ini juga menggambarkan bahwa kelompok tersebut seolah-olah tak memiliki hak yang sama dengan mahasiswa maupun buruh dalam menyuarakan aspirasinya. Sebab, mereka dianggap sebagai entitas yang terpisah dari berbagai elemen masyarakat yang turun untuk menyuarakan aspirasinya.

**2. Ideologi Polri terhadap Anarko-Sindikalis**

Dalam kerangka konseptual AWK yang digagas oleh Fairclough, ideologi merupakan salah satu konsep penting dalam menyingkap hubungan antara bahasa dengan kuasa. Wodak dan Meyer (2009) memahami ideologi sebagai keyakinan keseharian yang lebih tersembunyi dan latin, yang sering kali disamarkan dalam metafora dan analogi konseptual. Jika fokus AWK adalah untuk mengungkap efek dari relasi-kuasa dan ketaksetaraan dalam menghasilkan kesalahan sosial (*social wrongs*), maka penelusuran terhadap ideologi dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan dialektis antara wacana dan kuasa dalam proses sosial (2010b).

Hal ini menunjukan adanya keterkaitan dan keterikatan antara ideologi dengan kuasa. Sebab, ideologi pihak-pihak yang berkuasa memang cenderung lebih dominan. Fairclough (1992) meyakini bahwa ideologi akan semakin memiliki daya ketika disampaikan secara tersirat. Konsep utama dalam ketersiratan ini ialah upaya menanamkan ideologi melalui sebuah wacana, bukan sebagai fitur-fitur teks yang eksplisit, tetapi melalui asumsi-asumsi latar yang mengarahkan penyusun teks untuk mengonstruksi dunia dengan cara tertentu dan kemudian mengarahkan pembaca untuk memahami teks dengan cara tertentu. Dalam mengungkap ideologi pihak kepolisian dalam merepresentasikan kelompok anarko-sindikalis, penelitian ini melakukan identifikasi melalui penelusuran ketransitifan.

**Ideologi Polri melalui Ketransitifan**

Dalam *Systemic Functional Linguistics* (SFL) yang digagas Halliday (2014), transitivitas merupakan jenis proses yang menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah struktur kalimat

mendapatkan label. Transitivitas bertujuan untuk mengurai konstruksi pengalaman dunia nyata yang dibangun secara sistematis melalui sebuah bahasa. Kemudian, konstruksi pengalaman ini diwujudkan melalui verba atau kata kerja yang dibagi menjadi enam tipe proses, yakni proses material, proses verbal, proses mental, proses eksistensial, proses relasional, dan proses behavioral.

Proses material merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya suatu aktivitas fisik, perbuatan, atau peristiwa. Dengan kata lain, proses ini menggambarkan adanya suatu aktivitas yang dilakukan (*process of doing*) atau menampilkan adanya suatu kejadian (*process of happening*). Proses ini turut ditandai dengan penggunaan verba semacam 'menangkap', 'membuat', 'membakar', 'mengamankan', 'melakukan', dan lain sebagainya.

Apabila mempertimbangkan peran kelompok anarko-sindikalis dalam konstruksi wacana siaran pers pihak kepolisian melalui proses material, dapat dihasilkan sejumlah representasi. Setidaknya, terdapat dua pembagian peran (atau disebut sebagai partisipan) dalam proses material, yakni sebagai ACTOR, yakni partisipan yang melakukan sebuah proses fisik dan sebagai GOAL, yaitu partisipan yang dikenai atau menjadi sasaran sebuah tindakan. Berikut contoh proses material yang melibatkan kelompok anarko-sindikalis sebagai ACTOR atau partisipan yang melakukan sesuatu.

(11) Kelompok anarko tersebut **melakukan** perusakan terhadap fasilitas umum.

(SP-7-04)

(12) Kelompok anarko sempat **mengeroyok** petugas kepolisian yang bertugas.

(SP-7-14)

(13) Orang-orang yang sengaja **membuat** kericuhan saat demo berlangsung.

(SP-5-03)

Dalam data (11), (12), dan (13), kelompok anarko-sindikalis dan sejumlah leksikal yang terasosiasi terhadap mereka dihadirkan sebagai partisipan yang melakukan tindakan-tindakan tertentu (ACTOR) dalam proses material. Misalnya, verba-verba yang termasuk dalam proses material tersebut merupakan konstruksi keterlibatan partisipan pelaku dalam peristiwa demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja atau *Omnibus law*.

Dalam konstruksi sintaksis pada data, kelompok anarko-sindikalis hadir sebagai partisipan pelaku yang terlibat dalam aksi perusakan, pengeroyokan, dan kericuhan, karena melekat pada verba-verba seperti 'melakukan', 'mengeroyok', dan 'membuat'. Peran kelompok anarko-sindikalis dalam proses material ini merepresentasikan ideologi pihak kepolisian yang menganggap bahwa kelompok anarko-sindikalis sebagai pihak yang diidentikkan dengan peristiwa perusakan, pengeroyokan, dan kericuhan dalam demonstrasi.

Sementara dalam data di bawah ini menampilkan kehadiran kelompok anarko-sindikalis dan leksikal-leksikal yang terasosiasi dengan mereka sebagai partisipan yang menerima tindakan dari ACTOR.

(14) Polda Metro Jaya **mengamankan** hampir 1.000 orang dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang berakhir rusuh pada Kamis (08/01/2020).

(SP-5-01)

(15) Polda Metro Jaya beserta jajaran sudah **mengamankan** sekitar 400 pendemo yang diduga berasal dari kelompok anarko.

(SP-8-01)

(16) Dalam kondisi itu, kami **melakukan**endorongan dan penangkapan.

(SP-2-10)

Data (14), (15), dan (16), yang ditampilkan di atas merupakan verba-verba yang juga termasuk dalam kategori proses material. Perbedaan data di atas dengan data yang dihadirkan sebelumnya adalah

---



pergeseran peran kelompok anarko-sindikalis menjadi GOAL, atau partisipan yang mendapatkan tindakan dari partisipan lain, dalam hal ini pihak kepolisian.

Dalam data di atas, partisipan yang menjadi aktor ialah 'Polda Metro Jaya', 'Polda Metro Jaya beserta jajaran', dan "kami". Ketiga partisipan ini merujuk pada partisipan yang sama, yakni pihak kepolisian. Sementara itu, verba yang menandai proses material ialah 'mengamankan' dan melakukan. Kedua kata kerja ini merujuk pada peristiwa penangkapan massa aksi yang diduga terlibat kericuhan dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Peran kelompok anarko-sindikalis dalam proses material yang dihadirkan sebagai GOAL menunjukkan bahwa mereka dikonstruksi sebagai partisipan yang menerima tindakan-tindakan dari pihak kepolisian seperti ditahan, diamankan, dan ditangkap. Dengan kata lain, mereka hanya sebagai partisipan yang secara pasif menerima perlakuan dari pihak kepolisian.

Proses kedua yang ditemukan dalam penelitian ini ialah mental. Proses ini merupakan konstruksi pengalaman dunia nyata yang berkaitan dengan kesadaran manusia. Jika proses material berada di luar ruang kesadaran manusia, maka proses mental lebih bersinggungan dengan pengalaman-pengalaman yang berada di alam kesadaran manusia. Oleh karena itu, proses mental lebih sering dimaknai sebagai *clause of sensing* (Halliday dan Matthiessen, 2004).

Dalam proses mental, terdapat sebuah persepsi yang ditangkap dalam kesadaran manusia atau juga bisa terjadi karena adanya hal lain yang mempengaruhi kesadaran. Hal ini direalisasikan melalui verba-verba seperti 'mengetahui', 'menduga', 'menolak', dan lain sebagainya. Partisipan yang terlibat dalam proses mental ini, yakni SENSER. Sementara hal yang dirasakan, dipikirkan, atau dipersepsi oleh partisipan ialah PHENOMENON. Berikut contoh proses mental yang melibatkan kelompok anarko-sindikalis dalam wacana siaran pers Polri.

(17) *Perlu diketahui, kelompok anarko adalah orang-orang yang **menolak** keberadaan negara maupun aturan.*

(SP-5-05)

(18) *Orang ini yang pada saat **ingin** demo terkena razia yang memang ada indikasi rusuh.*

(SP-5-04)

(19) *Para perusuh yang ikut ambil bagian di aksi buruh **menolak** Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada Kamis (8/10/2020) kemarin di Jakarta, ternyata **dijanjikan** tiket kereta api dan uang.*

(SP-10-01)

Data (17), (18), dan (19) yang ditemukan dalam penelitian ini menggambarkan keterlibatan kelompok anarko-sindikalis dalam proses mental. Proses ini menunjukkan adanya persepsi, kognisi, dan keinginan terhadap sesuatu atau *process of sensing*. Sebab, verba-verba seperti 'menolak', 'ingin', dan dijanjikan, merupakan proses kognisi yang berkaitan dengan kesadaran manusia.

Verba-verba tersebut menerangkan konstruksi ideologi pihak kepolisian dalam mengonsepsi wacana terkait kelompok anarko-sindikalis. Sebab, kehadiran mereka sebagai SENSER memperlihatkan konstruksi kognisi mereka sebagai; pihak yang ingin melakukan kerusuhan; menolak keberadaan negara atau aturan; serta massa aksi yang diiming-imingi sesuatu agar mau melakukan kericuhan. Beberapa hal yang disebutkan ini merupakan partisipan yang hadir sebagai PHENOMENON, atau hal-hal yang dirasakan, dipikirkan, atau dipersepsi oleh SENSER.

Sementara itu, data-data di bawah ini menampilkan kehadiran kelompok anarko-sindikalis sebagai PHENOMENON. Sementara itu, partisipan utama dalam proses mental ini, atau SENSER, ialah pihak kepolisian. Berikut beberapa contohnya.

(20) Pihaknya **memastikan** para pedemo yang bertindak anarkis tersebut berasal dari kelompok anarko.

(SP-3-5).

(21) Ia **menuding** bahwa mereka yang diamankan adalah kelompok anarko, hingga masyarakat yang hanya memanfaatkan momen demonstrasi.

(SP-5-05)

(22) Polisi masih **mendalami** dugaan keterlibatan 285 orang dengan tindak pidana seperti melawan petugas, perusakan fasilitas umum hingga membawa senjata tajam.

(SP-9-07)

Data (20), (21), dan (22), menampilkan sejumlah verba-verba yang termasuk dalam kategori proses mental, yakni 'memastikan', 'menuding', dan 'mendalami'. Verba-verba tersebut mengonsepsi hal-hal yang dipikirkan, dirasakan, dan dipersepsi oleh pihak kepolisian terkait dengan kelompok anarko-sindikalis.

Misalnya, ketiga verba tersebut terasosiasi satu dengan sama lain, yakni pemikiran atau persepsi pihak kepolisian dalam mengonsepsi kelompok anarko-sindikalis yang direpresentasikan sebagai perusuh-perusuh yang ditangkap dalam aksi demonstrasi hingga massa aksi yang terlibat tindak pidana karena dianggap melawan petugas, melakukan perusakan fasilitas umum, hingga membawa senjata tajam. Konstruksi ini turut menggambarkan ideologi pihak kepolisian dalam merepresentasikan identitas kelompok anarko-sindikalis.

## KESIMPULAN

Pendedahan wacana siaran pers Polri dalam penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan, utamanya hubungan antara kuasa dan ideologi pihak kepolisian dalam merepresentasikan kelompok anarko-sindikalis melalui produksi wacana atau penggunaan bahasa.

Hubungan kuasa antara kepolisian dengan kelompok anarko-sindikalis memperlihatkan adanya kuasa di belakang wacana (*power behind discourse*) dan kuasa. Selain itu, senada dengan pendapat Fairclough, relasi-kuasa yang diidentifikasi dalam penelitian ini juga menggambarkan adanya hubungan dialektis antara kuasa atas (*power over*) dan kuasa untuk (*power to*). Hal ini karena pihak kepolisian memiliki kuasa untuk berbuat sesuatu lantaran mereka memiliki kuasa atas kelompok anarko-sindikalis.

Struktur kuasa semacam itulah yang membuat Polri mampu mengontrol maupun mendominasi kelompok anarko-sindikalis. Jika merujuk pada wacana siaran pers yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, perwujudan relasi kuasa itu tergambarkan melalui dua hal, yakni kehadiran aktor-aktor sosial yang menyajikan informasi serta pembatasan substansi serta cakupan informasi terkait representasi kelompok anarko-sindikalis.

Dengan demikian, kuasa yang dimiliki Polri tersebut memungkinkan penyusun teks untuk menanamkan ideologi mereka terhadap representasi kelompok anarko-sindikalis melalui wacana siaran pers yang diproduksi. Sejumlah stigma yang dilekatkan kepada kelompok anarko-sindikalis yakni perusuh, kelompok yang menunggangi demonstrasi, merusak fasilitas, mengeroyok petugas kepolisian, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Alameda-Hernández, Ángela. 2014. "SFL and CDA: Contributions of the Analysis of the Transitivity System in the Study of the Discursive Construction of National Identity (Case Study: Gibraltar)." *The Linguistics Journal* 3 (3): 160–75. <https://www.linguistics-journal.com/2014/01/07/sfl-and-cda-contributions-of-the-analysis-of-the-transitivity-system-in-the-study-of-the-discursive-construction-of-national-identity-case-study-gibraltar/>.

Brown, Gillian, dan George Yule. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Dijk, Teun A. van. 1997. *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. London: Sage.
- Dijk, Teun A. Van. 2001. "Critical Discourse Analysis." Dalam *The Handbook of Discourse Analysis*, disunting oleh Deborah Schiffrin, Heidi E. Hamilton, dan Deborah Tannen, 466–85. Oxford: Blackwell. doi:10.1002/9781118584194.ch22.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- . 2010a. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Longman.
- . 2010b. *Language and Power*. Harlow: Longman.
- Halliday, Michael Alexander Kirkwood, dan Christian M. I. M Matthiessen. 2014. *Hallidays Introduction to Functional Grammar*. London and New York: Routledge.
- Sriwimon, Lanchukorn, dan Pattamawan Jimarkon Zilli. 2017. "Applying Critical Discourse Analysis as a Conceptual Framework for Investigating Gender Stereotypes in Political Media Discourse." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 38 (2): 136–42. doi:10.1016/j.kjss.2016.04.004.
- Wodak, Ruth, dan Michael Meyer. 2009. "Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology 1." Dalam *Methods of Critical Discourse Analysis*, disunting oleh Ruth Wodak dan Michael Meyer, 1–33. London: SAGE. [https://www.researchgate.net/publication/265678850\\_Critical\\_Discourse\\_Analysis\\_History\\_Agenda\\_Theory\\_and\\_Methodology\\_1](https://www.researchgate.net/publication/265678850_Critical_Discourse_Analysis_History_Agenda_Theory_and_Methodology_1).